

ANALISIS PERBEDAAN SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN KEKAYAAN DI NEGARA ANGGOTA ASEAN

*ANALYSIS OF DIFFERENCES BEFORE AND AFTER ASEAN ECONOMIC COMMUNITIES
(AEC) TOWARDED ECONOMIC GROWTH AND WEALTH INEQUALITY IN ASEAN
COUNTRIES*

¹⁾Weka Kanaka, ²⁾Lucia Rita Indrawati, ³⁾Rian Destiningsih
^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia
wkanaka20@gmail.com

Abstrak

Asean Economic Community (AEC) atau biasa dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan perjanjian integrasi tingkat lanjut yang menitik beratkan pada kerjasama dibidang ekonomi, dengan membebaskan arus barang, jasa, modal maupun tenaga kerja ke sesama anggota. Hal tersebut secara umum dapat meningkatkan laju perdagangan maupun investasi pada negara-negara ASEAN yang pada akhirnya diharapkan memberikan pengaruh kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan disisi lain, ketika ada pertumbuhan ekonomi yang tidak hati-hati cenderung menyebabkan adanya kenaikan ketimpangan, terlebih dengan sistem yang bergaya liberal seperti ini cenderung menyebabkan menguatnya posisi tawar dari modal terhadap negara. Namun yang didapati ialah pertumbuhan ekonomi di ASEAN tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Sebab itulah yang menjadi tujuan dilakukan penelitian ini dengan memfokuskan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Kekayaan di era pasar bebas ini. Data yang digunakan adalah data sekunder, pada Pertumbuhan ekonomi bersumber dari *International Monetary Fund (IMF)* dengan data yang digunakan ialah Pertumbuhan GDP, sedangkan pada Ketimpangan Kekayaan bersumber dari Credit Suisse dengan data yang digunakan ialah Gini Rasio Kekayaan, Uji *Paired sample t-test* dilakukan untuk melihat perbedaan saat sebelum dan sesudah diberlakukan MEA. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Pertumbuhan ekonomi pada sebelum dan sesudah MEA tidak ada perbedaan yang signifikan, tapi pada angka riil maupun mean ada perbedaan. (2) Ketimpangan Kekayaan pada sebelum dan sesudah MEA juga tidak ada perbedaan yang signifikan, tapi sejatinya angka Gini rasionya rata-rata sudah berada pada posisi yang tinggi dan mengalami sedikit kenaikan.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Kekayaan, MEA.

Abstract

Asean Economic Community (AEC) or commonly known as the Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) is an advanced integration agreement that focuses on economic cooperation, by freeing the flow of goods, services, capital and labor to fellow members. In general, this can increase the rate of trade and investment in ASEAN countries, which in turn is expected to have an effect on increasing economic growth. Whereas on the other hand, when there is careless economic growth it tends to cause an increase in inequality, especially with a liberal-style system like this tends to cause a stronger bargaining position of capital against the state. But what was found was that economic growth in ASEAN didn't occur significantly. That is why the objective of this research is to focus on Economic Growth and Wealth Inequality in this free market era. The data used are secondary data, on economic growth sourced from the *International Monetary Fund (IMF)* with data used is GDP growth, while the Wealth Inequality is sourced from Credit Suisse with the data used is Gini Wealth Ratio, Paired Sample t-test to see the difference before and after the entry into force of the MEA. The results showed that (1) there was no significant difference in economic growth before and after the MEA, but in the real and mean numbers there were differences. (2) Wealth inequality before and after the MEA is also no significant difference, but in fact the Gini ratio of the average has been in a high position and has increased slightly.

Key Words : Growth of Economics, Inequality of Wealth, AEC.

PENDAHULUAN

Era globalisasi membawa masyarakat semakin terhubung dan saling bekerjasama dengan berbagai hal, baik antar masyarakat maupun lintas wilayah. Dimana dalam kerjasama terdapat tujuan yang berbeda-beda baik dalam perdagangan, politik, bahkan adapun yang bertujuan untuk menjaga hubungan disuatu wilayah.

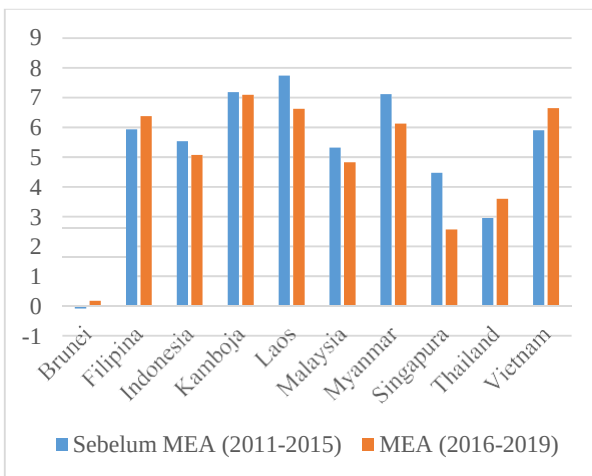
Salah satu perwujudannya ialah adanya ASEAN yang beranggotakan 10 negara saat ini yaitu; Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam. Yang mempunyai tujuan untuk melakukan kerjasama dalam perekonomian, budaya, maupun menjaga hubungan lintas negara. Dimana potensi konflik yang besar karena perselisihan wilayah warisan masa kolonial serta ketegangan Perang Dingin, membuat banyak diplomat di negara-negara Asia Tenggara merasa bahwa sebuah asosiasi yang benar-benar dapat memayungi negara-negara di kawasan ini adalah sebuah keharusan, meskipun dengan keraguan, akhirnya ASEAN berdiri pada tahun 1967 (Choiruzzad, 2015:5-6).

Namun, proses integrasi ekonomi ASEAN lebih lambat jika dibandingkan dengan integrasi ekonomi di wilayah lain, untuk mewujudkan komunitas ekonomi,

ASEAN memerlukan waktu 48 tahun dari lahirnya ASEAN pada 1967 hingga akhir 2015. Sementara Uni Eropa hanya perlu waktu 20 tahun. Salah satu yang menjadi bahan menarik untuk meneliti tentang ASEAN ialah adanya data yang dikeluarkan Data Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang menunjukkan, bahwa ekosistem perdamaian dan stabilitas yang diciptakan ASEAN telah memacu pertumbuhan ekonomi negara anggota lebih baik daripada rata-rata pertumbuhan dunia. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, Filipina 6 persen, Kamboja 7,1 persen, Laos 7 persen, Myanmar 8,2 persen, dan Vietnam 5,9 persen, di atas rata-rata dunia sebesar 3,1 persen (*International Monetary Fund*, 2017) dalam (Marsudi, 2017). Jadi, adapun terjadi pelambatan dalam proses integrasi ekonomi di ASEAN, namun negara-negara anggotanya mengalami pertumbuhan ekonomi yang berada di atas rata-rata.

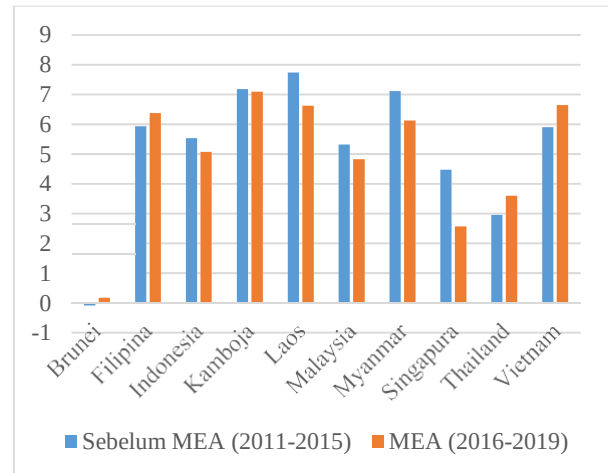
Dengan dihilangkan batasan diharapkan meningkatkan volume perdagangan antar negara yang pada akhirnya dapat memberikan hal positif terhadap perekonomian disetiap negara anggota. Seiring dengan itu, Menurut Nasrullah (2014) dalam Wulandari dan Zuhri (2019:122) suatu negara dapat dikatakan memiliki kondisi perekonomian yang baik

melalui perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau secara sederhana diukur dari peningkatan jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian dikenal dengan terminologi Produk Domestik Bruto (GDP). Sedangkan dilihat pada gambar 1 yang memuat rata-rata pertumbuhan GDP di negara-negara anggota ASEAN pada tahun sebelum diberlakukan MEA (2011 -2015) dan sesudah diberlakukannya MEA (2016 - 2019), dimana data menunjukkan kondisi sebaliknya.



Sumber : *International Monetary Fund, 2019*. Gambar 1 Perbedaan Rata-rata Pertumbuhan GDP di Negara Anggota ASEAN (%)

Sedangkan pada ketimpangan alat ukurnya ialah Indeks Gini, yang merupakan rasio untuk mengukur distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi



Sumber : *Global Wealth Databook, Credit Suisse (2011-2019)*.

Gambar 2 Perbedaan Rata-rata Rasio Kekayaan di Negara Anggota ASEAN (%)

Dapat dilihat juga pada gambar 2 terjadi kenaikan rata-rata ketimpangan di ASEAN sesudah diberlakukan kebijakan MEA, kenaikan ketimpangan terjadi pada 9 negara anggota, dimana hanya Myanmar saja yang mengalami penurunan rata-rata rasio gini.

Sesudah diberlakukannya kebijakan MEA pertumbuhan ekonomi di negara anggota ASEAN malah terjadi banyak penurunan, yaitu terjadi kepada 6 negara anggota dan hanya menyisakan 4 Negara yang mengalami kenaikan rata-rata GDP. kekayaan sesudah diberlakukannya MEA. Rata-rata kenaikan rasio terbesar dialami oleh Brunei Darussalam, yang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 14,96 persen.

Selain terjadinya kenaikan yang cukup besar, masalah ketimpangan untuk beberapa negara anggota ASEAN sudah sangat

mengkhawatirkan, seperti yang tercatat Thailand pada tahun 2015 masuk kedalam peringkat 10 besar negara dengan ketimpangan rasio gini kekayaan mencapai 84,8 sekaligus negara yang paling timpang di ASEAN. Sedangkan negara lain seperti Indonesia yang gini ratio-nya mencapai 84,7 menempati urutan ke-12 dalam daftar, Filipina juga yang mempunyai ketimpangan tak kalah tinggi sebesar 82,7 masuk ke daftar urutan ke-17. Setahun kemudian selepas pelaksanaan MEA yaitu pada tahun 2016, tercatat hanya Indonesia yang mengalami penurunan indeks gini ke angka 84,0. Sedangkan Thailand naik menjadi 85,9 dan Filipina pun turut naik menjadi 83,4. Selain adanya ketimpangan yang sangat besar, gejala kenaikan rasio rata-rata saat diberlakukannya MEA ini perlu ditelisik lebih dalam. Hal ini dirasa penting karena dimana pasar bebas ASEAN seharusnya tidak hanya dapat dirasakan manfaatnya oleh segelintir kalangan. Namun diharapkan kebijakan ini dapat membantu menyebarkan dampak positif dari perekonomian yang seharusnya meningkat guna kesejahteraan masyarakat dari masing-masing negara anggota.

Sedangkan penelitian dari Islam dan McGillivray (2019:27) menunjukkan bahwa ketimpangan kekayaan memiliki efek negatif

yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lintas negara. Sedangkan itu, Chomsky (2016:246) menjelaskan bahwa penggunaan kata “perdagangan”, konvensional juga cenderung menyesatkan. Angka-angka terakhir yang tersedia menunjukkan bahwa sekitar 30% atau 40% dari yang disebut “perdagangan dunia” sesungguhnya adalah transfer internal di kalangan korporat sendiri, dan ia percaya bahwa sekitar 70% ekspor Jepang ke AS adalah transfer antarfirma semacam itu. Hal ini Membuat peneliti tertarik untuk melihat adanya perbedaan pada pertumbuhan ekonomi beserta ketimpangan di negara anggota ASEAN saat sebelum dan sesudah diberlakukannya MEA.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan studi literatur melalui pengamatan dari analisa sumber data sekunder baik itu buku, *databook*, juga publikasi ilmiah. Data sekunder ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi, dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Data yang dibutuhkan dalam kegiatan analisa penelitian ini adalah data Pertumbuhan GDP di Negara Anggota

ASEAN didapatkan dari IMF, dan data mengenai Ketimpangan di dalam anggota ASEAN diperoleh dari *Credit Suisse* yang meneliti dengan alat indeks gini pendekatan kekayaan, sampel yang diambil ialah Sebelum MEA (2011-2015) dan Sesudah MEA (2016-2019).

Teknik Analisis Data

Data terlebih dahulu dilakukan uji normalitas Shapiro-Wilk untuk menentukan apakah data terdistribusi secara normal, dan menentukan apakah data dapat digunakan melalui pendekatan parametris atau harus melakukan pendekatan *non-parametris*. Namun, karena data penelitian ini terdistribusi secara normal maka digunakan uji parametris yaitu Uji Beda Rata-rata Berpasangan (*Paired Sample T-test*).

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Tetapi, uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan

kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya (Ghozali, 2018:161-163).

2. Uji Beda Rata-rata Berpasangan

Uji beda rata-rata dilakukan untuk mengetahui ada pengaruh tidaknya variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikatnya (*dependent variable*). Karena observasi dalam kedua sampel berhubungan dan berpasangan, maka kedua sampel ini dapat dianggap satu sampel yang sama.

Keterangan :

t = Nilai t yang dihitung.

μ_0 = Nilai yang dihipotesiskan.

S_D = Standar Deviasi (dari d).

$\bar{X}_D$ = Rata-rata X.

N = Jumlah anggota sampel.

Pengujian menggunakan uji beda rata-rata :

1. Hipotesis Pertumbuhan Ekonomi (X1) : $H_0 : x_{1.1} = x_{1.2}$, Tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah diberlakukan MEA terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara anggota ASEAN.

$H_1 : x_{1.1} \neq x_{1.2}$, Ada perbedaan sebelum dan sesudah diberlakukan MEA terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara anggota ASEAN.

2. Hipotesis Ketimpangan Kekayaan (X2) :

$H_0 : x_{2.1} = x_{2.2}$, Tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah diberlakukan MEA terhadap Ketimpangan Kekayaan di Negara anggota ASEAN.

$H_1 : x_{2.1} \neq x_{2.2}$, Ada perbedaan sebelum dan sesudah diberlakukan MEA terhadap Ketimpangan Kekayaan di Negara anggota ASEAN.

3. Dasar Pengambilan Keputusan :

- a. Berdasar perbandingan t hitung dengan t tabel:
 - Jika Statistik Hitung (angka t output) $>$ Statistik Tabel (tabel t), maka H_0 ditolak.
 - Jika Statistik Hitung (angka t output) $<$ Statistik Tabel (tabel t), maka H_0 diterima.
 - Tingkat signifikansi (α) adalah 5%, untuk uji DUA SISI maka masing-masing sisi menjadi 2,5%
 - Df (degree of freedom) atau derajat kebebasan dicari dengan rumus: $n-1$ atau $10 - 1 = 9$
 - Uji dilakukan dua sisi karena akan diketahui apakah rata-rata sebelum sama dengan rata-rata sesudah atau tidak. Uji dua sisi bisa diketahui pula dari output SPSS yang menyebutkan hasil *two tailed test*.

- b. Berdasar nilai probabilitas
 - Jika probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima.

- Jika probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak.

Untuk uji dua sisi, setiap sisi dibagi 2, hingga menjadi:

- Angka probabilitas/2 $> 0,025$, maka H_0 diterima.
- Angka probabilitas/2 $< 0,025$, maka H_1 diterima (Santoso, 2018:288- 289).

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Analisis Beda Rata – Rata Sampel Berpasangan (*Paired Sample T-test*)

Uji beda rata – rata berpasangan digunakan untuk melihat besarnya perbedaan dan signifikansi antara data sebelum adanya MEA dan sesudah diberlakukannya MEA terhadap dua variabel yang diuji yaitu: Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Kekayaan.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian uji dua beda sampel berpasangan dengan SPSS, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Hal ini dikarenakan nilai probabilitas Y_1 sebesar $0,303/2 = 0,1515$ lebih besar dari 0,025 sehingga Pertumbuhan Ekonomi tidak berbeda signifikan antara sebelum maupun sesudah diberlakukan MEA.

Begitu pula dengan t hitung yang sebesar 1,093 lebih kecil dari 2,262 (t -tabel) menandakan hal yang sama antara kedua cara mengambil keputusan yang dilakukan.

b. Ketimpangan Kekayaan

Berdasarkan hasil pengujian uji dua beda sampel berpasangan dengan SPSS, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Hal ini dikarenakan nilai probabilitas Y_2 sebesar $0,060/2 = 0,030$ lebih besar dari 0,025 sehingga ketimpangan kekayaan tidak berbeda signifikan antara sebelum maupun sesudah diberlakukan MEA.

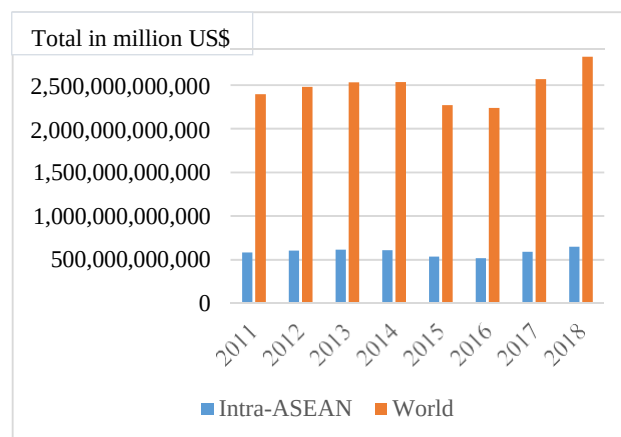
Sejalan dengan itu, dengan perhitungan menggunakan t hitung menunjukan, t hitung yang sebesar 2,147 lebih kecil dari 2,262 (t -tabel) menandakan hal yang sama, antara kedua cara mengambil keputusan yang dilakukan.

Pembahasan

a. Pertumbuhan Ekonomi

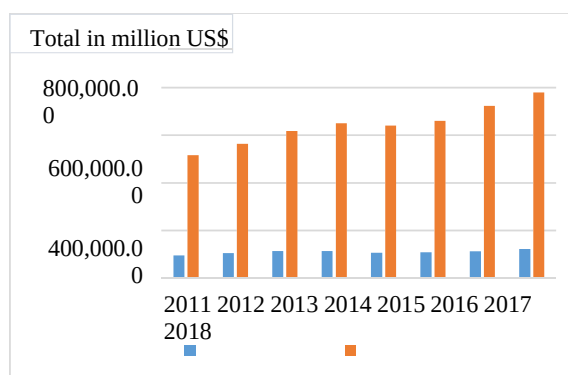
Menjawab sesuai hipotesis yang ada, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara anggota ASEAN sebelum dan sesudah diberlakukan MEA tidak ada perbedaan. Hasil ini dikarenakan beberapa hal, salah satunya signifikansi perdagangan antar negara anggota tidak banyak peningkatan, dan negara anggota ternyata memang cenderung lebih banyak melakukan transaksi dan kerjasama ke negara non-

anggota dibanding sesama anggota.



Sumber : aseanstats.org, 2019.

Gambar 3. Total Perdagangan Barang Intra ASEAN dan Dunia 2011 – 2018



Sumber : aseanstats.org, 2019.

Gambar 4 Total Perdagangan Jasa Intra ASEAN dan Dunia 2011 - 2018

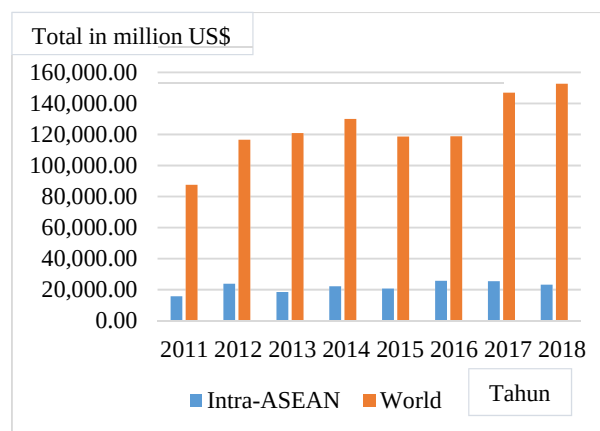
Gambar 3 dan 4 menjelaskan bahwa perdagangan barang maupun perdagangan jasa antar negara anggota di ASEAN masih sangat rendah dibandingkan total perdagangan dengan seluruh dunia, yang dimana persentase rata-rata perdagangan barang Intra-ASEAN hanya sebesar 24% terhadap total perdagangan ASEAN dengan seluruh dunia, sedangkan pada perdagangan jasa, angkanya lebih kecil lagi yakni sebesar

17% terhadap total perdagangan jasa yang dilakukan ASEAN, bahkan rata-rata perdagangan barang selepas terjadinya MEA terjadi penurunan dibandingkan saat kondisi sebelumnya. Kondisi ini dapat memperjelas hasil uji yang menunjukkan bahwa mengapa tidak adanya perbedaan antara Sebelum dan Sesudah diberlakukan MEA.

Sesuai dengan itu studi empiris yang dilakukan Sharma dan Shua (2000) dalam Ridwan (2009:100) menyimpulkan bahwa perdagangan di ASEAN meningkat sesuai dengan ukuran perekonomian, dan integrasi ekonomi ASEAN tidak meningkatkan perdagangan intra ASEAN. Kenyataannya, peningkatan pada perdagangan negara-negara ASEAN terjadi karena perdagangan dengan negara-negara APEC. ASEAN dapat menghasilkan suatu keuntungan lebih besar dalam perdagangan dengan pengurangan hambatan perdagangan secara unilateral dan multilateral di antara anggota maupun dengan negara di kawasan Asia Pasifik.

Dalam kesimpulan dari studi tersebut dapat dilihat bahwa adanya kecenderungan negara-negara ASEAN lebih banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara diluar ASEAN seperti yang diberitakan pada CNN (2018), maka dari itu selain integrasi dilakukan di ASEAN tetapi dimasukan pula kerjasama dengan negara-negara non

anggota seperti; China, Australia, India, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru, yang biasa disebut ASEAN+6. Bahkan negara-negara ini telah melakukan perundingan ekonomi yang dimana mereka sepakat untuk menyelesaikan perundingan perdagangan bebas Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) pada tahun 2019. Seperti yang diteliti pula oleh Ariyasajjakorn dkk (2009) Hasilnya menunjukkan bahwa manfaat keseluruhan untuk ASEAN akan meningkat secara signifikan jika ASEAN membuka dorongan integrasi untuk memasukkan ekonomi non-ASEAN yang besar, seperti Cina dan Jepang.



Sumber : aseanstats.org, 2019

Gambar 5 Total Investasi Langsung Intra ASEAN dan Dunia 2011 – 2018

Begitu pula perihal investasi, dengan adanya integrasi seharusnya membuat aliran modal dapat lebih leluasa bergerak bahkan berpindah-pindah antar negara dan secara teoritis dapat turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kegiatan

investasi khususnya FDI juga dapat meningkatkan perekonomian, setelah dilakukan integrasi ekonomi di berbagai negara, sifat dari aliran modal jangka pendek yang bersifat volatile, menyebabkan pemerintah dinegara maju maupun negara berkembang mengalih fokus mereka yang awalnya menarik aliran modal jangka pendek beralih untuk menarik masuk aliran FDI, (miankhel dkk, 2009) dalam Prawira et. al (2019:3). Ini dikarenakan FDI mempunyai dampak jangka panjang untuk penerima investasi.

Namun rata-rata FDI yang terjadi antar negara anggota tak lebih dari persentase sebesar 18% terhadap total FDI yang didapatkan oleh ASEAN, mungkin hal ini terjadi karena kurangnya akumulasi modal yang dimiliki oleh kawasan ASEAN. Seiringan dengan itu penelitian dari Setyari, et al. (2016:260-278), menunjukkan bahwa aliran modal tampaknya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting, sementara perdagangan ditemukan memiliki peran yang terbatas. Interaksi antara intensitas modal dan indikator keterbukaan tidak menunjukkan efek signifikan. Secara umum, tidak ada bukti bahwa negara-negara yang lebih berorientasi ke luar dengan tingkat intensitas modal yang tinggi mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jadi

walaupun secara umum memang aliran modal sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, namun untuk beberapa kasus pun menunjukkan efek yang tidak signifikan dan kemungkinan hal itu yang sedang terjadi di berbagai negara anggota ASEAN.

Kondisi ini juga dapat ditelisik dari faktor yang ada dalam eksternal anggota ASEAN, yang dimana pada tahun 2013 pemulihan dan normalisasi kebijakan di negara-negara maju menjadi faktor pemicu dari perlambatan pertumbuhan di negara-negara berkembang termasuk golongan ASEAN-5. Selain itu juga terjadi pembalikan aliran modal dari negara-negara berkembang kembali ke negara-negara maju. Melambatnya pertumbuhan ekonomi dan permintaan mitra dagang utama ASEAN-5 seperti Tiongkok dan Jepang juga telah memberi tekanan pada pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN-5 di tahun 2013 (Badan Kebijakan Fiskal:2014).

Selain itu, diperlukan keseragaman regulasi FDI dikawasan MEA baik itu perihal administrasi, AMDAL dan terkhusus pajak, dapat ditelisik penelitian Becker et al (2012) dalam Sasana (2019) yang melakukan penelitian di 22 negara Eropa dan menemukan hasil bahwa tarif pajak mempengaruhi kualitas dan kuantitas FDI. Maka dari itu regulasi terkait ini perlu untuk menjaga kestabilan investasi dan mengurangi

persaingan antar negara dalam menarik investasi dengan cara-cara yang destruktif.

b. Ketimpangan Kekayaan

Berdasarkan hasil uji dua beda sampel berpasangan (*Paired Sample t-test*) SPSS 25, menurut pengujian Ketimpangan Kekayaan memiliki nilai probabilitas sebesar $0,060/2 = 0,030$ sedikit lebih besar dari nilai batas kritis yaitu 0,025 yang menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berbeda secara signifikan saat dibandingkan antara sebelum dengan sesudah.

Dilihat pada hasil pengujian ketimpangan kekayaan, nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,025 dapat dilihat juga t hitung yang diperoleh sebesar 2,147 bernilai lebih kecil dari t tabel (0,025;9) sebesar 2,262, yang sejalan diantara kedua metode perhitungan menunjukkan tidak signifikannya perbedaan variabel sebelum dan sesudah. Maka, dapat dikatakan bahwa ketimpangan kekayaan di negara anggota ASEAN sebelum dan sesudah diberlakukan MEA masih identik atau tidak ada perbedaan.

Perlu disadari memberi percepatan ekonomi agar dapat dinikmati segala lapisan masyarakat merupakan salah satu maksud adanya sebuah integrasi ekonomi, yang diharapkan bahwa ketimpangan pun turut menurun. Walau sebenarnya ada

kecenderungan dengan adanya integrasi menyebabkan ketimpangan malah menaik. Dikarenakan posisi modal pada era pasar bebas menjadi lebih kuat dibandingkan posisi tenaga kerja. Karena modal memiliki kemampuan berpindah dari satu negara ke negara lain untuk memilih tingkat pajak ataupun beban produksi yang lebih rendah.

Perkembangan *Global Value Chain* kemudian mendorong besarnya ketertarikan perusahaan-perusahaan besar untuk berinvestasi di negara-negara berkembang. Selanjutnya, negara-negara berkembang cenderung berlomba memberikan insentif demi menarik investasi, termasuk juga di kawasan ASEAN, seperti yang dijabarkan oleh Pangeran (2016) dalam Sastra (2017:81), salah satu bentuk insentif untuk menarik investasi ialah mengurangi tingkat pajak, maka terciptalah negara-negara yang menjadi surga pajak (*tax heaven*), yaitu negara yang menawarkan tingkat pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Tingkat pajak yang rendah kemudian merusak distribusi pendapatan, baik di dalam

suatu negara maupun bila di lihat secara lebih luas dalam konteks dunia. Implikasinya, kelompok orang kaya dapat dengan mudah memindahkan modal dan investasinya dipajaki lebih rendah, karena mereka memindahkan asetnya ke negara-negara surga pajak.

Banyak ahli dan ekonom sepakat bahwa kenaikan tingkat ketimpangan ini karena pertumbuhan ekonomi hingga tahun 2014 tidak inklusif, selain itu, kenaikan harga komoditas juga dituding menjadi salah satu faktor yang membuat pertumbuhan konsumsi golongan menengah atas lebih cepat dibandingkan dengan golongan bawah selama periode 2000-an. Sektor sumber daya alam seperti pertambangan dan komoditas perkebunan besar mengalami kenaikan harga internasional. Kenaikan ini lebih banyak dinikmati golongan menengah atas, juga struktur dari pertumbuhan ekonomi yang lebih bias ke sektor jasa seperti komunikasi dan finansial (Sastra, 2017:214).

Apabila ditelisik kembali gambar 2 dan rasio ukuran dalam koefisien Gini. Yang membagi tingkat ketimpangan menjadi lima macam, yaitu : Ketimpangan sangat tinggi (Rasio Gini $\geq 0,8$), ketimpangan tinggi (0,6 - 0,79), ketimpangan sedang (0,4 - 0,59), ketimpangan rendah (0,2 - 0,39), dan ketimpangan sangat rendah ($<0,2$) (Sastra,

2017:41-42). Negara-negara anggota ASEAN berada di ketimpangan yang tinggi dan sangat tinggi. Terlihat hanya Brunei Darussalam dan Myanmar saja yang pernah mengalami ketimpangan pada standar sedang, itupun bagi Brunei meningkat pada beberapa tahun-tahun terakhir ini, dan bagi Myanmar terjadi karena penurunan rasio kekayaan dari golongan orang yang mempunyai kekayaan 10.000 – 100.000 US\$ dan 100.000 – 1.000.000 US\$ (CreditSuisse, 2017). Sehingga tidak adanya kenaikan ketimpangan paska MEA bukan merupakan tujuan akhir, namun diharapkan dengan adanya Integrasi

Ekonomi ini dapat menyebabkan penurunan rasio gini kekayaan lewat dibukanya keran perdagangan dan investasi dengan cara yang inklusif dan adil. Manfaat dari adanya integrasi harus selalu ditelisik dan dikaji apakah dapat memberi manfaat kepada masyarakat luas atau hanya kepada segelintir orang yang punya kuasa. Adapun hal-hal yang dirasa perlu dikaji ialah; Praktik perburuan rente yang sangat rawan dilakukan oleh pelaku ekonomi besar, menyebabkan penguasaan asset secara berlebihan, khususnya di negara-negara ekonomi yang lebih lemah, sekilas pada angka statistik dapat meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, namun akan memperlambat gairah pertumbuhan ekonomi

dalam jangka panjang, karena pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh perburuan rente merupakan pertumbuhan ekonomi yang non-produktif dan sekedar pada penguasaan aset-aset yang diperuntukan untuk dijual kembali dengan harga tinggi, ataupun di sewakan, yang dimana apabila praktik ini dibiarkan bebas, maka masyarakat kelas menengah bawah, ataupun kelas bawah akan kehabisan kesempatan untuk mengelola ataupun memiliki asset dengan sesuai daya belinya, pada akhirnya hal ini menyebabkan ekonomi kelas bawah susah untuk naik dan menimbulkan ketimpangan yang berkepanjangan.

Kebijakan *non-barrier* baik itu kuota ataupun tariff yang diberlakukan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN pun perlu ditelisik apakah nantinya hal itu dapat memberi manfaat kepada masyarakat umum suatu negara atau hanya menguntungkan masyarakat dengan ekonomi kuat atau pemain-pemain besar dalam industri, pasalnya barang-barang produksi dalam ekonomi padat karya ialah barang-barang primer yang sensitif, seperti produk pertanian, peternakan, perikanan, dan bahan-bahan dasar lainnya. Apabila barang-barang tersebut diliberalkan, maka akan ada produk yang kalah bersaing dipasar domestiknya, baik dari persaingan harga maupun kualitas,

alih-alih efisiensi, bahkan pihak yang kalah pada persaingan industri tersebut akan cenderung tidak mempunyai modal lagi untuk bersaing, sehingga akan menyebabkan matinya sektor tersebut disuatu daerah. Berbeda dengan sektor padat modal, yang mempunyai kapital yang besar dan mempunyai kemampuan bersaing secara bebas meski kadang mengalami gagal bersaing juga, tetapi sektor ini terkadang melakukan kerjasama dari industri hulu ke hilir, dan menciptakan efisiensi dari spesialisasi transfer antar firma. Dengan hal ini, apabila produk-produk sensitif juga tetap diliberalkan maka yang terjadi suatu saat akan menjadi masalah bagi industri produk padat karya di dalam suatu negara anggota, yang secara tidak langsung dapat menyebabkan ketimpangan tinggi.

Perihal aliran modal dalam era ini menjadi suatu hal yang sangat kuat, modal dengan mudah mendapat lahan baru untuk ekspansi, peran kapital pun berperan penting dalam meningkatkan kapasitas produksinya, dan hal ini tidak selalu dengan diiringi penambahan pekerja, bisa digunakan pula teknologi yang lebih canggih untuk memaksimalkan produksi. Kemudian adanya rantai pasok global maupun rantai nilai global, cenderung menguntungkan sektor swasta atau pengusaha Multinasional untuk

dapat mencari efisiensi biaya produksi hingga titik terendah demi meningkatkan akumulasi keuntungan, secara bersamaan menyebabkan kecenderungan masing-masing negara bersaing secara tidak sehat dalam upaya meraih Investasi ataupun Perusahaan Multinasional untuk masuk kedalam negaranya, dengan cara menurunkan standar-standar yang sudah mereka punya.

Apabila hal ini terus menerus dilakukan, maka yang terjadi ialah kurangnya aliran modal untuk upaya-upaya fiskal maupun pengurangan ketimpangan, dikarenakan pendapatan yang diambil oleh pemerintah kepada perusahaan sangat rendah, dan pemasukan pemerintah rendah sehingga tidak dapat dialokasikan kepada masyarakat secara luas.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil H_0 diterima yang artinya tidak ada perbedaan Pertumbuhan Ekonomi baik sebelum dan sesudah diberlakukan MEA di Negara anggota ASEAN. Tidak ada perbedaan ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya bahwa transaksi perdagangan maupun FDI anggota ASEAN lebih banyak dilakukan kepada negara non-anggota

dibandingkan kepada ke sesama negara anggota, atau dengan kata lain Integrasi Ekonomi yang terjadi belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan kepada Pertumbuhan Ekonomi paska terjadinya MEA.

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil H_0 diterima yang artinya tidak ada perbedaan Ketimpangan Kekayaan baik sebelum dan sesudah diberlakukan MEA di Negara anggota ASEAN. Tidak ada perbedaan ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti data ketimpangan di masing-masing anggota ASEAN memang sudah mengalami ketimpangan yang cukup parah, dengan rata-rata mengalami ketimpangan yang tinggi (0,6-0,79) dan sangat tinggi ($\geq 0,8$), terhitung hanya Myanmar saja yang mendekati kepada ketimpangan sedang (0,4-0,59) dengan rasio yang mereka alami yaitu 0,59 persen, sehingga angka ketimpangan ini memang sudah sulit untuk mengalami peningkatan, sedangkan untuk bergerak turun pun dengan adanya integrasi ekonomi cenderung susah untuk angkanya mengalami penurunan, dapat terlihat dari 10 negara anggota, rata-rata ketimpangan yang menurun sesudah diberlakukan MEA hanya terjadi pada Myanmar.

Saran

Dirasa perlu adanya diversifikasi dari

produk perdagangan ke sesama anggota, karena minimnya aliran perdagangan antar anggota ASEAN disinyalir karena mempunyai produksi yang sejenis ataupun cenderung mirip, contohnya ialah perdagangan dalam sektor primer. Serta diharapkan tidak terlalu bergantung dengan investasi dari dunia luar, agar tercapainya kemandirian bagi kelompok ASEAN, pasalnya dapat terlihat apabila ada gejolak dari ekonomi luar, hampir pasti menyebabkan gejolak pula dalam perekonomian bagi anggota di ASEAN.

Sedangkan dalam mengatasi ketimpangan di dalam negara diperlukan pemberian kebijakan yang sangat beragam, tergantung pada konteks ekonomi, kultur dan sistem dari setiap negara, dan keberhasilan dari suatu negara mungkin dapat menjadi referensi, tapi belum tentu dapat berhasil bagi negara lain. Namun, dalam konteks integrasi ekonomi, perlu adanya kerjasama regulasi antar negara anggota, dengan menyeragamkan kebijakan terhadap sektor aliran modal dan perdagangan di setiap negara anggota. Standarisasi pada sektor ini diperlukan untuk dapat mengimbangi kekuatan dari modal pada era integrasi ekonomi ini. Dengan kata lain, standarisasi berguna agar negara dapat bersaing secara sehat dan berkelanjutan.

Misalnya, standarisasi dalam regulasi AMDAL, peraturan ketenagakerjaan harus sesuai dengan HAM dan inklusifitas perkerja, CSR harus tetap dijalankan bagi setiap perusahaan, tingkat pajak yang disamaratakan antar negara anggota, dengan ini membuat Negara mempunyai posisi tawar terhadap adanya *capital*, sehingga walau terciptanya Integrasi Ekonomi tetapi eksistensi bagi setiap Negara masih tetap ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyasajjakorn, Danupon et.al. (2009). ASEAN FTA, distribution of income, and globalization. *Journal of Asian Economics*, (20), page 327–335.
- ASEAN Stats Data Portal. Diakses pada 14 Januari 2020. data.aseanstats.org.
- Choiruzzad, Shofwan Al Banna. 2015. *ASEAN DI Persimpangan Sejarah. Politik Global, Demokrasi, dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Chomsky, Noam. (Ed.) 2011. *How The World Works*. Terjemahan Tia Setiadi. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- CNN Indonesia. *Asean Plus Six Selesaikan Perundingan Perdagangan Bebas 2019*. Diakses pada 08 Januari 2020. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181115160543-92-346901/asean-plus-six-selesaikanperundingan-perdagangan-bebas-2019>
- Credit Suisse Research Institute. 2010 – 2019. *Global Wealth Databook*.

- Switzerland: Credit Suisse.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan IX. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- International Monetary Fund. 2019. *World Economic Outlook (October 2019)*. Diakses pada 26 Desember 2019 20:42.
<https://www.imf.org/external/datamapper/datasets/WEO>
- Islam Md. Rabiul dan Mark McGillivray. 2019. Wealth inequality, governance and economic growth. *Economic Modelling*, Page 1-35.
- Marsudi, Retno LP. 2017. *50 Tahun ASEAN*. Diakses pada 2 Februari 2020 11:08.
<https://nasional.kompas.com/read/2017/04/25/21002191/read-brandzview.html?page=all>
- Nizar, Muhammad Afdi. 2014. Laporan Dampak Asean Economic Community Terhadap Sektor Industri Dan Jasa, Serta Tenaga Kerja Di Indonesia. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal tahun anggaran 2014.
- Prawira, Bagaskara, Sudati N. Sarfiah dan Yustirania Septiani. 2019. Pengaruh Foreign Direct Investment (FDI, Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1998-2017. *Directory Journal of Economic*. Vol.1(1), page 1-10.
- Ridwan. (2009). Dampak Integrasi Ekonomi Terhadap Investasi Di Kawasan Asean: Analisis Model Gravitasi. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 5(2), page 95-107.
- Santoso, Singgih. 2018. *Menguasai Statistik dengan SPSS 25*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sasana, Hadi dan Fathoni, Salman. 2019. Determinant of Foreign Direct Investment Inflows in Asean Countries. *Journal of Economics and Policy JEJAK*. Volume 12 (2), page 253-266.
- Sastra, Eka. 2017. *Ketimpangan Ekonomi Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Expose Publika.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Setyari et.al. (2016). Capital Intensity, Openness, and The Economic Growth of The Asean 5. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 31(3), page 260 – 278.
- Wulandari, Laili Monita, dan Saifudin Zuhri. 2019. Pengaruh Perdagangan Internasional dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Tahun 2007-2017. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*. Vol. 4(2), page 119-12